BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Barang Rampasan.

1. Pengertian

Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang dianggap sebagai barang rampasan untuk negara sesuai penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ataupun barang yang dianggap sebagai barang rampasan untuk negara oleh hakim, dan/atau barang lain yang dipergunakan guna keperluan tersebut, memenuhi denda ataupun kompensasi pada perkara pidana.³

Kamus hukum mendefinisikan penyitaan sebagai hukuman tambahan yang mengizinkan perampasan properti yang terkait dengan atau berasal dari pelanggaran yang dilakukan dan diadili.⁴

Pelelangan bersama tidak bisa dijalankan secara terpisah terkecuali timbul kondisi yang mendesak, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran angka 9 Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 terkait Pelunasan Barang Sitaan yang menyatakan : “Barang sitaan masuk pada suatu putusan Pengadilan secara tunggal pada umumnya tidak diperbolehkan untuk dijual secara pelelangan secara terpisah, terkecuali saat kondisi yang mendesak”.⁵

³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2019

⁴ Simorangkir, J.C.T.,dkk. Kamus Hukum. Jakarta : Snar Grafika 2000 hlm. 126.

⁵ Kejaksaan Agung RI. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1210.

2. Jenis Jenis Barang Rampasan

Sesuai peraturan terkait yakni Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-089/J.A/1988 mengenai Penetapan Barang Sitaan pada Pasal 12 hingga Pasal 14, golongan barang sitaan dibedakan sebagai berikut :⁶

1. Barang curian dilarang diimpor dan diedarkan. Implikasi dari kalimat di atas adalah, setelah memperoleh barang sitaan kategori ini, barang tersebut tidak memiliki dokumentasi yang lengkap atau merupakan produk yang diperdagangkan secara ilegal. Kategori barang yang dijarah mencakup perangkat teknologi, mobil, kapal, dan aset serupa, yang biasanya dipergunakan dalam keperluan negara ataupun masyarakat.
2. Barang-barang yang diambil alih dipergunakan dalam tujuan pemerintahan ataupun kemasyarakatan. Implikasi dari kalimat di atas adalah bahwa kategori aset yang dijarah ini dapat memenuhi tujuan pemerintah dan masyarakat. Barang sitaan yang digolongkan yakni sepeda motor, rumah tinggal (dalam sengketa perdata), dan sebagainya.
3. Barang-barang rampasan yang dilenyapkan. Implikasi dari pernyataan di atas yakni bahwa kategori barang rampasan tersebut tidak bisa diterapkan untuk tujuan pemerintahan atau masyarakat. Produk yang disita yakni obat terlarang, heroin,

⁶ Ibid hlm. 1211 – 1219.

ganja, morfin, dan sebagainya. Kejaksaan Agung RI berinteraksi dengan Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan penyitaan produk semacam itu.

3. Penyelesaian Barang Rampasan

Terkait penyelesaian barang rampasan ini disebutkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 mengenai Pelelangan dan Penuaian Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi pada Pasal 12 yang menyebutkan bahwa :⁷

“Barang Milik Negara yang Disita harus diserahkan oleh Satuan Kerja Teknis kepada Bagian Pembuktian dan Pengelolaan Barang Sita untuk diselesaikan pada periode waktu empat belas (14) hari sejak diterimanya putusan pengadilan”

Penyelesaian barang sitaan diatur dengan Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 yang mengatur sebagai berikut :⁸

1. Batas waktu penyelesaian barang sitaan dibatasi selambatnya empat bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Batasan waktu itu wajib, dan Jaksa wajib menaatinya. Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP mengatur : “a. Ayat (3) : Apabila putusan pengadilan mengamankan penyitaan barang bukti untuk negara, dengan tidak termasuk pengecualian-pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 46, maka Penuntut Umum menyerahkan barang itu pada Kantor Lelang Negara yang akan

⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelelangan dan Penuaian Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

⁸ Kejaksaan Agung RI. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm.1211 – 1212.

melelangnya pada jangka waktu tiga bulan, beserta hasilnya. disetorkan ke kas negara atas nama jaksa”. b. Ayat (4) : “Jangka waktu yang dimaksud pada ayat (3) bisa dilakukan perpanjangan maksimal sebulan”.

2. Penyingkiran barang sitaan secara umum dilakukan melalui lelang oleh Kantor Lelang Negara, kecuali jika Jaksa Agung Republik Indonesia menetapkan alternatif tindakan terhadap barang khusus, yang dapat berupa pemanfaatan untuk urgensi negara ataupun urgensi umum maupun pemusnahan, khususnya dalam hal penyelundupan yang melibatkan impor dan distribusi terlarang. Khususnya mengenai produk-produk yang diperoleh secara tidak sah melalui penyelundupan yang dilarang untuk diimpor serta disebar. Jaksa Agung Republik Indonesia bisa mengalokasikan beberapa barang tertentu untuk keperluan negara ataupun masyarakat, maupun mengizinkan pemusnahannya. Langkah ini harus dilakukan untuk menjaga dan/atau melestarikan komoditas produksi dalam negeri.
3. Setiap satuan barang sitaan dari suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diserahkan kepada Bagian yang bertanggung jawab pada jangka waktu tujuh (7) hari sejak diterimanya putusan, sebelum digolongkan sebagai barang sitaan. Pemindahan ini harus disertai dengan salinan putusan atau cuplikan putusan beserta pendapat hukumnya. Mengenai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan : “Pembebasan barang sitaan untuk menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dijalankan atas permintaan

tertulis dari penuntut umum”. b. Yang dimaksudkan pada poin 3, a. wajib dilaksanakan melalui berita acara resmi.

4. Diperuntukkan untuk urgensi negara ataupun masyarakat maupun barang sitaan, khususnya yang bersumber dari peristiwa penyelundupan serta pelanggaran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. INPRES Nomor 9 Tahun 1970 terkait Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara atau Barang Milik Negara, dipergunakan pada penyelesaian untuk keperluan pengajuan premi atau penghargaan.

B. Pengertian Tentang Lelang.

1. Pengertian

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 36/KMK.04/2002 terkait Pelayanan Pra Lelang Lelang Barang Yang Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, mendefinisikan pada Pasal 1 Angka 5, bahwasanya lelang ialah penjualan suatu barang secara umum, yang dapat dijalankan melalui media elektronik, yang meliputi penawaran lisan yang menaikkan harga, menurunkan penawaran harga, dan/atau penawaran harga tertulis yang didulukan untuk menarik pihak yang berkepentingan.⁹

Menurut kamus hukum, lelang diartikan sebagai penjualan umum suatu barang yang diberikan kepada penawar tertinggi.¹⁰ Ketiga penafsiran tersebut menunjukkan bahwa pelelangan harus dilakukan secara terbuka dan diumumkan

⁹ CV. Eka Wijaya. Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jakarta : 2002 hlm. 605.

¹⁰ JCT. Simorangkir, dkk. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika 2000 hlm.90.

melalui media massa dan elektronik, sehingga menarik peserta dari beragam kalangan masyarakat yang tertarik dengan barang rampasan yang dilelang, disertai penawaran harga terhadap barang tersebut.

2. Jenis-Jenis Lelang

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020 terkait Petunjuk Pelaksanaan yang mengungkapkan bahwasanya lelang itu terbagi 3 jenis, yakni : ¹¹

1. Lelang Eksekusi ialah penjualan yang dilakukan dalam menegakkan putusan pengadilan atau surat-surat yang disamakan dengan itu, dan/atau untuk menjalankan kewajiban aturan perundangan. Lelang Eksekusi terdiri atas : ¹²
 - a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
 - b. Lelang Eksekusi pengadilan;
 - c. Lelang Eksekusi pajak;
 - d. Lelang Eksekusi harta pailit;
 - e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);
 - f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

¹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

- g. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- i. Lelang Eksekusi barang rampasan;
- j. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;
- k. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanaan dan cukai;
- l. Lelang Eksekusi barang temuan;
- m. Lelang Eksekusi gadai;
- n. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- o. Lelang Eksekusi barang bukti tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan;
- p. Lelang Eksekusi benda sitaan sesuai Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; dan
- q. Lelang Eksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Lelang Non-Eksekusi Wajib adalah proses lelang yang dilaksanakan untuk penjualan barang-barang yang diharuskan oleh ketentuan hukum untuk dilelang. Lelang Non-Eksekusi Wajib mencakup :¹³
- a. Lelang Lelang Barang Milik Negara atau Daerah;
 - b. Lelang produk milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk Non-Persero;
 - c. Lelang aset milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - d. Lelang barang milik negara yang berasal dari cadangan pabean dan cukai;
 - e. Lelang barang gratifikasi;
 - f. Lelang Barang Milik Negara/Daerah yang dibongkar karena proses perbaikan;
 - g. Lelang Barang Milik Negara berupa barang konsumsi hasil pemilihan umum;
 - h. Lelang aset Bank Bekas Dalam Likuidasi (BDL);
 - i. Lelang aset untuk penyelesaian obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dalam Akta Pengakuan Utang (APU);
 - j. Lelang aset bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau manajemen PT. *Asset Management Company*;
 - k. Lelang Warisan yang tidak terkelola atas harta benda orang yang dinyatakan hilang;

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

- l. Lelang Barang Berharga dari Kapal Tenggelam (BMKT);
 - m. Lelang aset Bank Indonesia;
 - n. Lelang Barang Milik Negara/Daerah berupa hadiah atau undian yang tidak diambil atau tidak tertebak;
 - o. Lelang barang habis pakai atau limbah proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
 - p. Lelang barang yang berada dalam penguasaan kejaksaan, yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik atau yang berhak karena tidak ditemukan atau ditolak oleh pemilik atau yang berhak.
 - q. Jenis lelang Non-Eksekusi lainnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.
2. Lelang Non-eksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.¹⁴ Lelang Non-eksekusi Sukarela terdiri dari :
- a. Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara atau Daerah yang berbentuk perseroan terbatas;
 - b. Lelang barang dari perusahaan yang berada dalam proses likuidasi, kecuali ada ketentuan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

- c. Lelang barang milik Badan Layanan Umum atau Badan Hukum Pendidikan yang bukan tergolong sebagai Barang Milik Negara;
- d. Lelang barang milik perwakilan diplomatik asing;
- e. Lelang barang milik individu atau entitas swasta;
- f. Lelang hak tagih (piutang);
- g. Lelang primer terhadap kayu dan produk hutan lainnya;
- h. Lelang Non-Eksekusi Sukarela lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pelaksanaan Lelang

Barang rampasan yang hendak dilelang harus mencapai pemenuhan ketentuan aturan perundangan yang diberlakukan. Sementara itu, tata cara yang wajib diselesaikan oleh para pihak yang menjalankan pelelangan barang sitaan (dalam hal ini dilakukan oleh kejaksaan) yakni mencakup :

- a. Izin Izin dari pimpinan atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Pembentukan panitia lelang yang terdiri dari pejabat penjualan;
- c. Evaluasi dan spesifikasi nilai batas;
- d. Pengajuan permohonan lelang;
- e. Pengumuman publik;
- f. Eksekusi lelang;
- g. Pemindahtanganan barang dan bukti kepemilikan (jika ada) kepada pemenang lelang;
- h. Pengelolaan hasil lelang.

Dalam pelaksanaan pelelangan terdapat pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan hal ini, yakni :

1. Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa penuntut didefinisikan sebagai pejabat fungsional yang secara hukum diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, termasuk kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Pasal ini mengatur tentang peran Jaksa Penuntut Umum, institusi Kejaksaan, serta fungsi fungsionalnya.

Penuntutan sendiri merupakan langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk membawa suatu perkara ke Pengadilan Negeri guna diperiksa dan diputus oleh hakim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jabatan fungsional jaksa menuntut keterampilan teknis dalam lingkup kejaksaan, yang bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas penuntutan. Dalam kapasitasnya, jaksa memiliki peran sebagai penuntut umum serta bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, jaksa memiliki dua kewenangan utama, yaitu sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor. Jaksa Penuntut Umum merupakan pejabat yang menangani perkara dalam tahap penuntutan dan satu-satunya pihak yang berwenang melaksanakan putusan hakim.

Sementara itu, jaksa yang tidak memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum tidak diperbolehkan melakukan proses penuntutan maupun eksekusi. Adapun jaksa yang menjalankan tugas di luar ranah penuntutan tetap disebut sebagai jaksa.

2. Jurusita

Di Pengadilan Negeri, terdapat struktur pejabat yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan berbagai perkara, baik pidana maupun perdata. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, susunan pejabat di Pengadilan Negeri mencakup Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, serta Jurusita.

Apabila ditinjau dari tugasnya, terdapat kesamaan antara peran Jurusita dengan Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus, khususnya pada subseksi eksekusi. Keduanya berfungsi sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dalam konteks ini, kewenangan mereka dalam melaksanakan proses lelang terhadap barang rampasan didasarkan pada perintah Ketua Sidang.

4. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika di Indonesia ialah obat yang sangat penting bagi pelayanan kesehatan yang ketersediaannya harus terjamin. Narkotika apabila digunakan secara berlebihan bisa mengakibatkan ketergantungan sehingga menjadikan keamanan, sosial, mental, gangguan fisik, serta ketertiban masyarakat yang selanjutnya melemahkan ketahanan nasional. Narkotika harus diatur termasuk pada tingkat nasional ataupun internasional karena sifatnya yang merugikan. Narkotika

ialah senyawa ataupun obat, termasuk yang bersumber dari tumbuhan ataupun yang disintesis, yang bisa mengubah kesadaran, menghilangkan persepsi sensorik, meringankan atau menghapus rasa sakit, dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan.¹⁵

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan definisi narkotika :

“Zat yang memberikan efek spesifik pada penggunaannya saat memasuki tubuh”. Efek ini dapat mencakup anestesi, analgesia, peningkatan antusiasme, dan terjadinya halusinasi atau manifestasi fantasi. Fitur-fitur yang dikenali dan diidentifikasi dalam profesi medis dirancang untuk aplikasi terapeutik dan kesejahteraan manusia dalam pembedahan, pengurangan rasa sakit, dan bidang terkait”.¹⁶

Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat dalam bidang kesehatan, penelitian, dan teknologi. Namun, banyak individu yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sering kali dalam jumlah berlebihan dan melebihi batas yang diizinkan. Untuk menanggulangi penyalahgunaan tersebut, pemerintah merespons dengan cepat melalui penerbitan undang-undang yang membatasi penggunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang narkotika setelah mengalami berbagai revisi. Meskipun telah diterapkan aturan hukum, pelanggaran terkait narkoba masih terus terjadi, baik

¹⁵ 9Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25-27

¹⁶ (Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7)

untuk kepentingan pribadi maupun demi memperoleh keuntungan, dengan beragam modus operandi. Selain itu, beberapa aparat penegak hukum yang bertugas dalam pemberantasan narkoba justru menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pemusnahan barang bukti narkoba, karena memperumit pembuktian selama proses hukum berlangsung.

Dalam bukunya kapita selekta hukum pidana, Sudarto menjelaskan bahwa istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani narke, yang berarti keadaan dibius hingga kehilangan sensasi. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh sifat zat tersebut yang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang, termasuk emosi, kognisi, suasana hati, serta perilaku, baik melalui konsumsi oral, inhalasi, injeksi, maupun metode lainnya.

Obat yang dikonsumsi secara oral akan melalui lambung sebelum akhirnya masuk ke dalam aliran darah. Sebaliknya, zat yang dihirup atau diserap melalui saluran hidung langsung memasuki pembuluh darah di paru-paru. Jika disuntikkan, zat tersebut segera masuk ke aliran darah dan diteruskan ke otak (sistem saraf pusat). Di dalam otak, berbagai jenis narkoba dapat memodifikasi emosi serta proses kognitif penggunaannya, yang berpotensi menimbulkan efek seperti ketenangan, relaksasi, euforia, dan perasaan bebas.

Penulis mendefinisikan penyalahgunaan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau pejabat berwenang dalam mengamankan barang bukti narkoba dengan cara yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini membuka peluang bagi oknum penyidik atau pejabat untuk melakukan tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Tindak pidana narkotika merujuk pada aktivitas ilegal yang dilakukan individu dengan menggunakan zat kimia atau obat-obatan terlarang yang secara hukum dilarang. Zat tersebut dapat memengaruhi kesadaran, menghambat persepsi pancaindra, meredakan rasa sakit, serta menyebabkan ketergantungan baik bagi pengguna maupun pihak lain. Konsep tindak pidana narkotika mencakup empat aspek utama, yaitu:

- a. Adanya perbuatan pidana
- b. Adanya subjek pidana
- c. Adanya penggunaan zat, dan
- d. Akibat

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan pemusnahan total terhadap barang sitaan, yang dapat dilakukan melalui pembakaran, metode mekanis, atau teknik lain, baik dengan maupun tanpa bahan kimia. Ketentuan ini mencakup seluruh bagian tanaman narkotika, termasuk batang, daun, bunga, biji, serta akar, dengan memastikan bahwa barang sitaan, baik dari jenis tumbuhan maupun non-tumbuhan, benar-benar dimusnahkan.

Barang rampasan, yang juga dikenal sebagai barang bukti, mencakup narkotika dan prekursorinya, zat yang diduga mengandung narkotika atau prekursor, serta berbagai alat atau barang yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi narkotika. Selain itu, kategori ini juga meliputi aset yang diperoleh dari aktivitas yang berkaitan dengan narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang

berhubungan dengan zat-zat tersebut. Barang-barang ini dikenakan penyitaan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursorinya.

Seiring waktu, berbagai bentuk kejahatan terus berkembang, mencerminkan sifat dinamis dari kriminalitas, di mana pelanggaran terkait narkotika menjadi bagian tak terpisahkan dari tren tersebut. Kejahatan narkotika, khususnya bisnis perdagangan obat terlarang, merupakan bagian dari operasi organisasi kriminal transnasional.

Sebagai suatu zat yang memiliki dampak ganda terhadap kehidupan masyarakat dimana dalam suatu sisi dapat digunakan sebagai obat atau bahan yang memiliki nilai manfaat sebagai sarana medis atau dalam pelayanan kesehatan masyarakat serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan, namun pada sisi yang lainnya juga dapat menimbulkan masalah ketergantungan terhadap si pemakai jika tidak dalam ketentuan resep medis.

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pengendalian dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan, didukung oleh penegakan hukum yang tegas oleh otoritas atau lembaga berwenang. Mengingat bahwa kejahatan dalam kategori ini menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional, keterkaitannya dengan ancaman serta dampaknya sangat mendalam dan berbahaya. Kejahatan tersebut berpotensi merambah berbagai aspek keamanan serta stabilitas nasional maupun global, sehingga dapat menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan politik dan melemahkan otoritas negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai alat bukti. Namun, KUHAP merinci jenis barang yang dapat disita, antara lain:

- a. Benda Barang atau uang milik tersangka atau terdakwa yang diyakini, baik sebagian maupun seluruhnya, diperoleh dari atau merupakan hasil kejahatan.
- b. Barang yang secara langsung digunakan dalam tindak pidana atau untuk memudahkan persiapannya.
- c. Barang yang dipergunakan untuk menghambat proses penyidikan tindak pidana.
- d. Barang yang secara khusus dirancang atau ditujukan untuk melakukan aktivitas ilegal.
- e. Barang tambahan yang memiliki keterkaitan yang jelas dengan tindak pidana yang dilakukan

Suatu tindak pidana berfungsi sebagai dasar mendasar untuk membebankan tanggung jawab kepada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, bergantung pada adanya larangan sebelumnya dan ancaman hukuman yang terkait. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang menegaskan bahwasanya tidak terdapat sebuah perbuatan yang bisa dianggap melanggar hukum atau dikenai sanksi pidana kecuali jika ditentukan secara tegas pada perundangan.

Prinsip ini terangkum di pepatah Latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*, yang artinya tidak terdapat kejahatan, tidak terdapat hukuman tanpa

undang-undang sebelumnya, sebuah konsep yang diartikulasikan oleh sarjana hukum Jerman von Feuerbach. Asas legalitas memuat tiga arti, yakni :

1. Tidak terdapat suatu tindakan yang dapat dianggap haram dan dipidana sebagai tindak pidana sebelum diartikulasikan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Analogi tidak boleh digunakan untuk memastikan adanya suatu tindak pidana.
3. Ketentuan hukum pidana mungkin tidak berlaku surut.

Di bahasa Belanda, tindak pidana disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga suku kata : '*straf*' yang berarti pidana dan hukum; '*baar*,' artinya bisa dan boleh; dan '*feit*', yang menunjukkan tindakan, perbuatan, pelanggaran, dan peristiwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pun adalah hasil terjemah dari "*starbaarfeit*", meskipun tidak diberikan uraian jelasnya. Kegiatan kriminal umumnya identik dengan delik, memiliki asal dari istilah Latin *delictum*.¹⁷

Perbuatan pidana ialah kesalahan mendasar yang dijalankan pada individu pada saat menjalankan sebuah kejahatan. Agar suatu kesalahan dapat terjadi, korelasi diantara kondisi dan perilaku yang mengakibatkan kesalahan harus disengaja atau tidak bertanggung jawab. Kesengajaan (*dolus*) serta kelalaian (*culpa*) dianggap sebagai wujud kesalahan, sementara istilah definisi kesalahan (*schuld*) merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga memerlukan pertanggungjawaban atas segala tindak pidana yang dilakukan.

¹⁷ Ibid, hlm. 28

Sehingga, seseorang dapat dituntut, dan jika terbukti terjadi tindak pidana, maka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum terkait.¹⁸

Di ilmu hukum, terdapat perbedaan diantara frasa “pidana” dan istilah “hukuman”. Sudarto menyatakan bahwasanya istilah "hukuman" terkadang dipergunakan sebagai pengganti "*straf*"; meskipun demikian, ia percaya bahwa "kriminal" adalah istilah yang lebih tepat daripada "hukuman".¹⁹ Muladi menegaskan bahwa “hukuman”, sebagai ungkapan yang umum dan umum, memiliki makna yang luas dan terus berkembang, karena dapat mencakup wilayah yang luas. Frasa ini sering digunakan bukan sekadar dalam bidang hukum namun juga dalam wacana biasa pada bidang pendidikan, etika, agama, serta bidang lainnya. Dikarenakan kekhususan istilah "kriminal", maka perlu untuk menggambarkan makna atau makna inti istilah tersebut untuk disoroti karakteristik atau atributnya yang berbeda.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang dituangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) oleh pembentuk perundangan seringkali dikenal sebagai *strafbaarfeit*. Para pembuat perundangan tidak memberi klarifikasi apa pun tentang *strafbaarfeit*; oleh karena itu, para ahli hukum pidana seringkali mempergunakan istilah tindak pidana, kejadian pidana, dan kejahatan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya.²⁰

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 8

²⁰ Muladi dkk, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1992, hlm 13

Pengertian tindak pidana menurut para ahli : ²¹

1. Sesuai perspektif Simons, tindak pidana diartikan sebagai suatu tindakan yang menyalahi hukum pidana, diancam oleh pidana, dan dijalankan dengan kesalahan oleh orang yang mampu memikul tanggung jawab;
2. Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai pelanggaran norma (pengganggu ketertiban hukum) yang dijalankan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh pelakunya sehingga memerlukan penjatuhan pidana untuk menegakkan ketertiban hukum dan menjaga kepentingan hukum;
3. Simons mengartikan tindak pidana sebagai suatu kegiatan yang bertentangan dengan hukum pidana, yang dijalankan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta yang menurut hukum pidana dapat diancam pidana;
4. E. Utrecht mengartikan tindak pidana sebagai hakekat suatu kejadian pidana, yang sering disebutnya sebagai kejahatan, meliputi baik perbuatan (tindakan positif) maupun kelalaian (kelambanan negatif), beserta akibat yang diakibatkannya (suatu keadaan yang timbul). dari perbuatan atau kelalaiannya);

²¹ <http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, Diunduh pada 15 Agustus 2017 pukul 10.30 WIB

5. Sejalan dengan itu, Moeljatno menyampaikan bahwasanya tindak pidana ialah tindakan yang dilarang serta dikenakan akibat pidana bagi setiap orang yang menyalahi pembatasan itu. Kegiatan ini juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai penghambat tatanan sosial yang dicarinya.;
6. Van Hmamel sependapat dengan definisi Simons tentang tindak pidana, namun menegaskan bahwa perbuatan tersebut mempunyai kualitas yang melekat sehingga dapat dihukum. Konsep tindak pidana sebagaimana dikemukakan Van Hamael mempunyai lima unsur :
 1. Dipaksakan oleh peraturan perundang-undangan pidana;
 2. Melanggar hukum;
 3. Dijalankan oleh individu yang melakukan kesalahan (*schuld*);
 4. Individu dianggap bertanggung jawab terkait tindakannya;
 5. Sifat perbuatan yang dikenai hukuman.

Dalam literatur hukum pidana, istilah kejahatan sering digunakan, namun pembuat undang-undang menggunakan frasa kejadian kriminal, tindakan kriminal, atau tindakan kriminal ketika merumuskan undang-undang. Artikulasi pengertian tindak pidana menurut kewenangan hukum.

Wirjono mengungkapkan bahwa :²²

“Kata “peristiwa pidana” pertama kali digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada UUDS tahun 1950, khususnya pada pasal 12 ayat (1). Yang dimaksud dengan peristiwa pidana pada dasarnya adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh tindakan manusia atau peristiwa alam”. Teguh Prasetyo mengartikulasikan bahwa :²³ “Tindak pidana ialah tindakan yang dilarang undang-undang dan dikenakan sanksi pidana”. Istilah 'aktivitas' dalam konteks ini berbeda dengan tindakan pasif dan aktif”. Tindak Pidana sesuai perspektif Jan Remelink, yakni :²⁴

“Tindakan yang dianggap tidak dapat ditoleransi dalam konteks budaya tertentu pada waktu tertentu, sehingga memerlukan koreksi melalui tindakan hukum”.

Kitab Undang-Undang Hukum Ilegal mengkategorikan kegiatan ilegal atas dua jenis : pelanggaran serta kejahatan, yang setiapnya dirinci pada Buku II dan Buku III. Pelanggaran sanksi tidak seberat pelanggaran pidana. Banyak terminologi yang digunakan untuk menandakan konsep *strafbaarfeit*. Beragamnya terminologi dan penafsiran yang dipergunakan oleh para ahli didorong oleh justifikasi serta

²² 5 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33.

²³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49

²⁴ ink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1

pertimbangan yang logis berdasarkan perspektif individual ahli. Berikut unsur-unsur tindak pidana :

1. Unsur Formal mencakup :

- a. Tindakan manusia mencakup semua aktivitas, termasuk kelambanan, yang dilakukan oleh individu.
- b. Melanggar undang-undang pidana. Dalam konteks bahwa suatu perbuatan hanya akan dikenai pidana jika diatur dalam undang-undang pidana yang ada, maka hakim tidak dapat menuntut suatu tindak pidana yang tidak mempunyai kerangka peraturan tersebut, dengan demikian, tidak ada tindakan kriminal.
- c. KUHP menguraikan berbagai hukuman yang bergantung pada tindak pidana tertentu yang dilakukan.
- d. Pelanggaran tersebut harus dijalankan oleh seseorang yang dianggap bersalah, yakni berbagai unsur yang diperlukan mencakup kemauan, keinginan, atau persetujuan dari pelaku, yang bertindak dengan niat, menyadari konsekuensi dari tindakan mereka sebelumnya. Kesalahan pada arti sempit bisa dimaknai sebagai kesalahan yang dilakukan pencipta dikarenakan kurang menaruh perhatian pada akibat hukum yang tidak diinginkan.
- e. Tanggung jawab menetapkan bahwa mereka yang memiliki gangguan ingatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Fondasi akuntabilitas seseorang terletak pada kondisi jiwanya.

2. Unsur Material suatu tindak pidana berlawanan pada undang-undang sehingga menimbulkan ketidaksetujuan masyarakat agar suatu perbuatan dianggap tidak pantas. Dengan demikian, walaupun perbuatan itu sesuai dengan ketentuan hukum, namun bila tidak dianggap melawan hukum, maka tidak termasuk perbuatan pidana. Tindak pidana dalam hukum pidana mempunyai dua kategori, yaitu komponen obyektif dan aspek subyektif :
 - a. Disengaja (*dolus*) ataupun tidak disengaja (*culpa*).
 - b. Tujuan upaya ataupun provokasi yang dimaksudkan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Beragam tujuan ataupun merek yang dicontohkan pada pelanggaran seperti pemalsuan, pemerasan, penipuan, dan pencurian.
 - d. Perbuatan berencana atau *voorbedachteraad* termasuk dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.
 - e. Sensasi teror itu yakni tercakup pada definisi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP.

Narkotika di Indonesia termasuk obat yang sangat penting bagi pelayanan kesehatan yang menjadikan ketersediaannya harus terjamin. Narkotika apabila digunakan secara berlebihan bisa mengakibatkan ketergantungan sehingga menyebabkan gangguan keamanan, sosial, mental, fisik, serta ketertiban masyarakat yang selanjutnya melemahkan ketahanan bangsa. Narkotika harus

diatur baik di tingkat nasional maupun internasional karena sifatnya yang merugikan.²⁵ Narkotika ialah obat ataupun zat, termasuk yang bersumber dari tumbuhan ataupun yang diproduksi secara sintetik, yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan persepsi sensorik, meringankan atau menghapuskan rasa sakit, dan bisa mengakibatkan ketergantungan

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan definisi narkotika :

“Zat yang mengakibatkan efek spesifik pada individu setelah dimasukkan ke dalam tubuh”. Efek ini dapat mencakup anestesi, analgesia, peningkatan antusiasme, dan halusinasi atau timbulnya fantasi. Fitur-fitur yang diidentifikasi dalam bidang medis dirancang untuk aplikasi terapeutik dan kesejahteraan manusia dalam pembedahan, pengurangan rasa sakit, dan bidang terkait”.²⁶

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 meliputi opium mentah, tanaman *papaver*, opium olahan (termasuk opium, jicingko, jicing, opium terapeutik), *morfin*, kokain mentah, daun koka, tanaman koka, kokain, *ecgonine*, resin ganja, tanaman ganja, dan garam atau turunan morfin dan kokain. Bahan lain, baik alami, sintetik, ataupun semi sintetik, yang tidak disebutkan sebelumnya, yang bisa berfungsi sebagai pengganti morfin ataupun kokain, yang oleh Menteri Kesehatan digolongkan sebagai narkotika karena berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan ketergantungan, serta campuran atau sediaan yang memuat kandungan garam ataupun turunan morfin dan kokain, atau

²⁵ <http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positif>

²⁶ 7 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7

bahan alam atau olahan lainnya yang ditetapkan sebagai narkotika oleh Menteri Kesehatan.

Sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika menggolongkan Narkotika atas tiga golongan, mengacu kepada pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I ialah zat yang diperuntukkan semata-mata untuk penelitian ilmiah dan tidak digunakan untuk tujuan terapeutik. Obat ini memiliki potensi yang signifikan untuk menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya.
2. Narkotika Golongan II ialah obat yang efektif dipergunakan menjadi upaya terakhir pada pengobatan, pengembangan, penelitian, atau terapi. Meskipun demikian, obat-obatan ini berkemampuan untuk menyebabkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah golongan obat yang mempunyai manfaat terapeutik, sering digunakan untuk pengobatan dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai kecenderungan kecil menimbulkan ketergantungan.

Narkotika diklasifikasikan ke dalam dua kelompok berdasarkan sumber bahan atau komposisinya:

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin dihasilkan dari getah tanaman *Papaver somniferum*. Meskipun tidak tumbuh di Indonesia, zat ini sering kali masuk melalui perdagangan ilegal.

- b. Kokain diekstrak dari daun tanaman koka dan umumnya diproduksi di wilayah Amerika Selatan, seperti Peru, Bolivia, dan Kolombia.
- c. Cannabis Sativa yang lebih dikenal dengan nama marihuana atau ganja, tanaman ini banyak dibudidayakan di Indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi Sintetik : merupakan hasil ekstraksi dan isolasi alkaloid dari opiat. Beberapa contoh dari kategori ini meliputi heroin, kodein, dan morfin.
- b. Sintetik : dihasilkan melalui proses kimia dari bahan mentah, menciptakan senyawa baru dengan efek narkotika. Zat ini banyak digunakan dalam penelitian medis dan memiliki manfaat sebagai analgesik serta penekan batuk (*antitusif*).

Bersamaan dengan penggunaan anestesi, dokter sering meresepkan opioid sintetis kepada individu yang mengalami gangguan penggunaan zat untuk membantu mengurangi resistensi mereka terhadap sugesti (kambuh) atau meredakan gejala putus zat. Beberapa contoh obat dalam kategori ini mencakup amfetamin, metadon, petidin, dan deksamfetamin. Sementara itu, zat yang sering disalahgunakan meliputi morfin, heroin, petidin, mariyuana, hashish, kokain, dan lainnya. Penggolongan zat-zat ini adalah sebagai berikut:

1. Opiat atau Opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang berasal dari bunga opium dan terkadang digunakan dalam penelitian medis sebagai analgesik atau pereda

nyeri. Opium termasuk dalam kategori obat alami dan umumnya dikonsumsi melalui inhalasi.

- a. Memunculkan sensasi terburu-buru (*rush*);
- b. Meningkatkan perasaan euforia;
- c. Mengubah persepsi waktu menjadi lebih lambat;
- d. Memicu pusing dan gangguan keseimbangan;
- e. Meningkatkan gairah dan mengurangi hambatan seksual;
- f. Menyebabkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.

2. Morfin

Nama "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin merupakan alkaloid analgesik kuat yang menjadi komponen aktif utama dalam opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk meredakan nyeri. Morfin tidak memiliki bau, berasa pahit, dan mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap seiring waktu. Obat ini diberikan melalui suntikan intradermal (di bawah kulit), intramuskular (ke dalam otot), atau intravena (ke dalam pembuluh darah).

- a. Menimbulkan euforia;
- b. Memicu mual, muntah, dan sembelit;
- c. Menyebabkan kebingungan;
- d. Memicu produksi keringat berlebih;
- e. Berisiko menyebabkan pingsan dan jantung berdebar;
- f. Memicu kegelisahan dan perubahan suasana hati;
- g. Menyebabkan mulut kering dan perubahan warna wajah.

3. Heroin atau Putaw

Heroin adalah derivatif dari morfin 3,6 yang diperoleh melalui proses asetilasi. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sementara heroin yang beredar di jalanan sering kali berwarna putih keabu-abuan akibat campuran zat lainnya. Bentuk kristal putihnya umumnya berupa diamorfin hidroklorida atau garam hidroklorida. Heroin biasanya dikonsumsi dengan cara disuntikkan atau dihirup.

- a. Penurunan denyut jantung;
- b. Penurunan tekanan darah;
- c. Pelemasan otot;
- d. Pengecilan pupil mata;
- e. Menciptakan kondisi di mana pengguna merasa terisolasi dari realitas.

4. Ganja atau Kanabis

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis sativa* dan *Cannabis indica*, yang mengandung tiga senyawa utama, yaitu tetrahidrokanabinol (THC), kanabinol, dan kanabidiol. Zat ini biasanya dikonsumsi dengan cara dihirup, baik dengan cara digulung menyerupai rokok maupun menggunakan pipa.

- a. Peningkatan denyut jantung atau nadi;
- b. Mulut kering (*xerostomia*);
- c. Meningkatkan perasaan rileks, verbalisasi berlebihan, dan euforia;
- d. Gangguan dalam mengingat peristiwa tertentu.

5. Kokain

Kokain merupakan senyawa alkaloid yang diekstrak dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. Karena sifatnya yang sangat adiktif, kokain diklasifikasikan sebagai narkotika, setara dengan morfin dan heroin. Zat ini biasanya dikonsumsi dengan cara dihirup menggunakan sedotan atau gulungan kertas, serta dapat dibakar bersama tembakau sebelum dihirup. Penggunaan kokain dengan cara dihirup berisiko merusak jaringan bagian dalam rongga hidung.

- a. Menimbulkan gangguan kulit (*dermatologis*);
- b. Memicu kejang dan gangguan pernapasan;
- c. Produksi lendir atau dahak berlebihan;
- d. Menyebabkan paranoia;
- e. Menghambat proses pencernaan serta menekan nafsu makan.

6. Amfetamin

Amfetamin dan turunannya, seperti *D-pseudoefedrin*, pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan mulai dipasarkan pada tahun 1932 sebagai dekonjestan hidung. Zat ini umumnya berbentuk bubuk putih atau keabu-abuan. Amfetamin memiliki dua jenis utama, salah satunya adalah *methylenedioxymethamphetamine* (MDMA), yang lebih dikenal dengan sebutan ekstasi. Dalam bentuk tablet, MDMA dikonsumsi secara oral, sedangkan dalam bentuk kristal, zat ini dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan aluminium foil, lalu asapnya dihirup melalui

hidung atau dengan alat kaca khusus (*bong*). Selain itu, dalam bentuk kristal yang telah dilarutkan, amfetamin juga dapat disuntikkan secara intravena.

- a. Palpitasi atau detak jantung yang tidak teratur;
- b. Peningkatan suhu tubuh (*hipertermia*);
- c. Kesulitan tidur (*insomnia*);
- d. Euforia yang berlebihan;
- e. Agitasi atau gelisah berlebihan;
- f. Bicara berlebihan (*logore*);
- g. Meningkatkan keberanian atau agresivitas

Ketentuan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) berfokus pada penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sangat krusial untuk memahami beberapa undang-undang dasar yang diberlakukan untuk menangani pelanggaran terkait narkotika, yaitu :

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 terkait KUHAP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 terkait Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 terkait Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.